

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI RABU
15 NOV 2023



**KETUA DPRD PASER : PORKAB JADI
AJANG MENYAMBUT PORPROV 2026**



Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi

KETUA DPRD PASER : PORKAB JADI AJANG MENYAMBUT PORPROV 2026

PASER - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi meminta agar para atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) ke-XVII Paser 2023 dapat menjaga sportivitas dan solidaritas.

"DPRD akan selalu mendukung penuh kegiatan Porkab yang diselenggarakan oleh KONI maupun Pemkab," kata Hendra Wahyudi, Senin (13/11/2023).

Hendra Wahyudi juga berharap, agar Porkab yang diikuti oleh 10 Kecamatan se-Kabupaten Paser ini menjadi momentum kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan multi cabang olahraga di Kabupaten Paser, termasuk dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 mendatang.

"Kegiatan itu menjadi pemantik semangat yang harus dijaga, sampai tahun-tahun berikutnya," kata politikus PKB itu.

Pasalnya, sejumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan pada Porkab Kabupaten Paser turut dipertandingkan di Porprov Kaltim 2026 mendatang. Apalagi, Kabupaten Paser sudah ditetapkan sebagai tuan rumah pada ajang 4 tahu-

nan itu.

"Mari kita jadikan kejuaraan itu sebagai ajang kebersamaan sebagai warga Paser, selain persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi pada 2026," katanya.

Untuk diketahui, Porkab Paser 2023 kali ini terselenggara setelah 11 tahun tidak pernah digelar. Adapun total yang terlibat mencapai 2.293 orang, di antaranya terdiri 1.868 orang atlet, 199 pelatih dan 226 official. Sementara ada 14 cabor dipertandingkan dalam porkab itu.

Cabor tersebut terdiri dari 13 cabang wajib seperti atletik, bola voli, bulu tangkis, dayung, pencak silat, sepakbola, tenis meja, basket, futsal, catur, pickleball, renang, karate, dan sepatu roda sebagai cabor ekshibisi.

Terdapat pula tiga olahraga masyarakat yang dipertandingkan, yaitu senam kreasi, balogo, dan layang-layang khas. Namun jenis olahraga ini tidak masuk dalam kriteria perhitungan perolehan medali, tapi menjadi ajang kompetisi kreasi dengan penilaian tersendiri.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



PENAMBAHAN BTS PENTING BAGI WILAYAH PENYANGGA IKN



DPRD PPU DUKUNG PEMKAB LARANG
KEGIATAN DINAS DI LUAR DAERAH



Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Jon Kenedi. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

PENAMBAHAN BTS PENTING BAGI WILAYAH PENYANGGA IKN

PENAJAM - Penambahan menara telekomunikasi (base transceiver station/BTS) di sejumlah wilayah yang tidak terjangkau akses internet di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sangat penting karena sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) atau ibu kota negara Indonesia baru.

Penambahan menara telekomunikasi di sejumlah wilayah yang tidak terjangkau akses internet, menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Jon Kenedi di Penajam, Senin (13/11/2023) harus segera dilakukan sebagai daerah mitra Kota Nusantara.

"Pelayanan harus dapat berjalan dengan baik terutama peningkatan jaringan internet," tambahnya.

Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk dapat melakukan penambahan menara telekomunikasi di sejumlah wilayah yang tidak terjangkau akses internet.

Penambahan menara telekomunikasi itu, jelas dia, akan semakin banyak fasilitas pendidikan, pelayanan dan komunikasi dapat berjalan semakin lancar.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen mendukung penambahan

menara telekomunikasi untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat di daerah berjuduk di daerah Benuo Taka itu.

"Saat ini jaringan internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting," ujarnya.

Pembangunan pelayanan berbasis digital harus terus ditingkatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata dia, karena akan beriringan dengan pembangunan dan perkembangan Kota Nusantara.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga Kota Nusantara, harus segera mengatasi masalah fasilitas pendukung yang berhubungan dengan komunikasi, kata Jon Kenedi.

Dinas Kominfo Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini telah menyiapkan lahan pada sembilan lokasi pembangunan menara telekomunikasi di sejumlah wilayah yang tidak terjangkau akses internet di daerah berjuduk Benuo Taka itu.

Lahan itu berada di Kecamatan Penajam tiga lokasi di Desa Bukit Subur, Giripurwa dan Desa Sidorejo, empat lokasi di Kecamatan Babulu di Desa Rintik, Gunung Makmur, Sumber Sari dan Desa Labangka Barat, serta di Kecamatan Sepaku dua lokasi di Desa Mentawir dan Karang Jinawi. (Ant/MK)

Oleh Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Ahmad Buchori



Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Sujiati. (Robbi/MediaKaltimGroup)

SUJAITI: PETANI BABULU MINTA BENDUNGAN TELAKE DIREALISASIKAN

PPU – Bendungan Telake di Kecamatan Longkali Paser dianggap perlu bagi para petani Babulu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati inginkan Pemerintah Daerah (Pemda) merealisasikan pembangunan Bendung Sungai Telake.

Selama ini para petani di dapilnya tersebut tidak maksimal lantaran irigasi pertanian yang ada tidak maksimal, solusi yang sangat tepat ialah merealisasikan bendungan Telake.

“Bendung itu merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan para petani di Babulu,” ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Dalam pengolahan areal persawahan, masyarakat hanya mengandalkan air tadah hujan selama ini tanpa adanya bendungan yang

dapat dimanfaatkan.

“Kalau musim kemarau seperti saat ini lahan persawahan kering kerontang karena selama ini hanya mengandalkan air tadah hujan,” ungkapnya.

Lanjut Sujiati, ia tegaskan akan selalu memperjuangkan pembangunan Bendung Sungai Telake karena kehadirannya sangat dinantikan para petani Babulu.

Ia mengatakan bahwa permasalahan ini telah disampaikan ke Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Daerah berkali-kali.

“Kami terus berupaya agar pengairan itu tetap terealisasi apalagi adanya IKN, sekali lagi DPRD PPU mendorong agar Pemerintah Daerah dapat merealisasikan sesegara mungkin,” tutupnya. (ADV/NRD)



Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin saat diwawancarai. (Robbi/MediaKaltimGroup)

ZAINAL OPTIMIS SERAPAN APBD MAKSIMAL AKHIR 2023

PPU – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) optimis terhadap serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 akan maksimal hingga akhir tahun.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin menyakinkan bahwa penyerapan anggaran dapat maksimal hingga akhir 2023. Faktanya, sebelum APBD Perubahan 2023 disahkan serapan anggaran telah mencapai 62 persen.

“Dari perkembangan yang ada, bahwa serapan anggaran sudah mencapai 62 persen. Karena adanya perubahan anggaran, kemajuan serapan terhitung menjadi 52 persen saja. Kami yakin anggaran akan terserap hingga akhir tahun sesuai dengan target yang

diinginkan,” ujarnya, Kamis (9/11/2023).

Lanjutnya Zainal, ia juga meminta SKPD di lingkungan PPU, dapat memaksimalkan penyerapan anggaran 2023 hingga menyusul selisih 10 persen. Karena adanya anggaran perubahan tersebut.

Harapannya organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai memetakan kegiatan yang sudah masuk dalam dokumen perubahan. Agar pelaksanaannya dapat mempercepat serapan APBD 2023.

“Serapan anggaran sampai saat ini Kami kira masih dalam batas wajar dan masih ada waktu untuk memaksimalkannya, harapannya semangat SKPD saat ini dapat sangat menyelesaikan target yang dicapai,” pungkasnya. (ADV/NRD)



Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin saat ditemui. (Robbi/MediaKaltimGroup)

DPRD PPU DUKUNG PEMKAB LARANG KEGIATAN DINAS DI LUAR DAERAH

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melaksanakan kegiatan di luar PPU.

Hal ini mendapatkan apresiasi langsung dari Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin mengatakan bahwa kebijakan yang diambil merupakan terobosan baru yang baik untuk kemajuan PPU.

“Langkah Pj Bupati PPU yang melarang kegiatan pertemuan hingga pelaksanaan program yang di jalankan oleh SKPD di luar dari PPU itu merupakan langkah yang baik dan patut kita apresiasi,” ucapnya, Sabtu, (11/11/2023).

Lanjutnya Raup, Ia mengatakan kebijakan atau langkah yang diambil memiliki ala-

san yang mendasar untuk kemajuan PPU, salah satu tujuannya yakni agar perputaran ekonomi tidak keluar dari PPU khususnya.

“Kegiatan apapun yang dilaksanakan wajib di wilayah sendiri. Kalau kita melakukan kegiatan di luar daerah, itu sama saja memperkaya Kabupaten atau Kota lainnya,” tegasnya.

SKPD yang ingin melaksanakan kegiatan diminta dapat memanfaatkan potensi yang ada di PPU, sehingga Hotel dan Gedung Serbaguna maupun tempat wisata yang ada di PPU juga dapat dimaksimalkan dengan berkegiatan di PPU.

“Maka dari itu Kami sangat mengapresiasi yang menjadi kepentingan Daerah, harapannya kegiatan yang dilaksanakan dapat melibatkan pelaku usaha lokal agar perekonomian masyarakat berjalan,” pungkasnya. (ADV/NRD)



**TINGKATKAN KAPASITAS
WARTAWAN, DISPORA KUKAR GELAR
PELATIHAN JURNALISTIK DAN UKW**



Proses pembukaan pelatihan jurnalistik keolahragaan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). (Rafi'i/Media Kaltim)

TINGKATKAN KAPASITAS WARTAWAN, DISPORA KUKAR GELAR PELATIHAN JURNALISTIK DAN UKW

TENGGARONG - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelatihan jurnalistik keolahragaan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) selama tiga hari. Sejak tanggal 13-15 November 2023, di Ballroom Hotel Grand Fatma Tenggarong. Diikuti oleh puluhan wartawan yang berasal dari Kalimantan Timur (Kaltim).

Dispora Kukar sendiri, menggaet pihak ketiga yang berasal dari Jakarta. Yakni menggandeng Pusdiklat Tribhuwana untuk pelatihan jurnalistik keolahragaan. Sebanyak dua narasumber yang dihadirkan, yang nantinya akan membahas teknik pemberitaan tentang olahraga.

"Mudahlah dengan adanya pelatihan, para jurnalis ibaratnya bisa memanfaatkan ilmu yang digunakan untuk keseharian

dalam menulis berita," ujar Kasi Peningkatan Organisasi Olahraga Dispora Kukar, Beni Ariandi, Selasa (14/11/2023).

Sementara untuk UKW sendiri, melibatkan dua organisasi besar wartawan Indonesia. Yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim. Dengan total peserta sebanyak 53 wartawan dari Kaltim.

Ketua PWI Kukar, Bambang Irawan, pun mengapresiasi dan menyambut baik pelatihan jurnalistik keolahragaan dan UKW yang digelar oleh Dispora Kukar, melalui aspirasi Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono.

Tentunya dengan adanya pelatihan dan UKW ini, membuat wartawan di Kukar memiliki kompetensi. Karena dalam bekerja, wartawan merupakan

profesi yang harus memiliki kompetensi.

"Kami harap semua dapat sertifikasi kompetensi, jadi ketika liputan tidak ada lagi wartawan yang belum kompeten," kata Bambang.

Namun ia pun berharap kerjasama antara PWI Kukar dan Dispora Kukar bisa terus berlanjut. Tidak hanya sebatas sertifikasi dan peningkatan kapasitas saja, namun seluruh kegiatan yang bersifat kewartawanan.

Diketahui, total 53 peserta yang mengikuti UKW. Masing-masing 36 wartawan dari PWI Kukar, yang terbagi dalam 24 wartawan kelas Muda, 6 wartawan kelas Madya dan 6 wartawan kelas Utama. Sementara dari IJTI Kaltim mengikuti 17 wartawan. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



DEWAN GELAR RDP BAHAS KEMBALINYA BUAYA RISKA

BACA HALAMAN A2



RSUD BONTANG PUNYA CT SCAN 128 SLINCE, TERIMA PASIEEN DARI LUAR



Anggota DPRD Bontang membahas terkait buaya Riska. (Dwi).

Dewan Gelar RDP Bahas Kembalinya Buaya Riska

BONTANG – DPRD Bontang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkot Bontang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (14/11/2023). RDP kali ini membahas rencana pengembalian Buaya Riska ke habitatnya di Sungai Guntung.

Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang mengatakan RDP ini membahas terkait Buaya Riska yang sedang menjadi bahan pembicaraan, berencana akan dikembalikan ke habitatnya.

"Kita bersama-sama membahas permasalahan ini, dimana permasalahan ini sudah sangat menyebar luas," paparnya.

Dikatakannya, yang menjadi permasalahan jika membuat penangkaran bukan hanya tempat, akan tetapi makannya, perawatannya, dan berbagai macam lainnya. Itu juga harus dipikirkan kedepannya, tidak dengan biaya yang sedikit.

"Kita tidak bisa hanya membahas tempat atau lokasinya saja, akan tetapi jika nantinya sudah menjadi penangkaran kita harus memikirkan lain-lainnya juga," tambahnya.

Untuk tempat, ada tiga lokasi yak-

ni Sungai Nyerakat di Bontang Lestari, kedua di Sungai Bontang Lestari (tidak jauh dari sungai nyerakat, dan ketiga di Sungai Guntung.

"Intinya, untuk lokasi kita masih mempertimbangkan, belum dipastikan dimana jelasnya," bebernya.

Agus Haris juga menambahkan, bahwa untuk kembalinya Buaya Riska, semuanya harus dipersiapkan dengan matang, agar tidak ada kendala lagi yang terjadi. Semuanya harus siap.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Wakil Ketua DPRD, Anggota Komisi I, beserta jajaran lainnya mengadakan rapat terkait Buaya Riska. (Dwi).

Tiga Sungai Jadi Alternatif Relokasi Buaya Riska

BONTANG - Tiga sungai menjadi alternatif pilihan Pemkot Bontang, sebagai tempat habitat kembalinya Buaya Riska. Ketiga lokasi ini pun sudah disurvei secara langsung. Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan DPRD Bontang di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (14/11/2023).

Ketiga sungai itu di antaranya, pertama di Sungai Nyerakat dekat dengan Lapas Klas IIA Bontang, kedua di sungai yang masih berada pada jalur lokasi pertama, dan ketiga di Sungai Kanibungan, Guntung.

Lukman, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kota Bontang mengatakan, pihaknya telah meninjau langsung untuk menjadi tempat penangkaran Buaya Riska. Hal itu pun telah berdasarkan oleh arahan dari kepala daerah.

"Saat ini masih kita tindaklanjuti, jika nantinya jadi dikembalikan ke Bontang, harus ditempatkan di-

mana, dengan segala pertimbangan yang matang," ucapnya.

Ditambahkannya, pemilihan ketiga lokasi itu tidak mengeluarkan biaya terlalu besar, akan tetapi yang menjadi pertimbangan salah satunya ialah banyak masyarakat yang juga beraktivitas di dekat lokasi tersebut.

"Jika ada lokasi yang lebih memungkinkan, kenapa tidak. Akan tetapi semuanya ada perhitungannya," ungkapnya.

Lukman juga menambahkan, untuk sekarang pun lokasi yang cocok saat ini di Sungai Guntung, akan tetapi sebelum Buaya Riska dikembalikan ke Bontang untuk tempat dan segala macam yang ada harus benar-benar siap, baru ditempatkan langsung Buaya Riska tersebut.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam



Rombongan Komisi III DPRD Bontang saat sidak di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala. (Dwi).

Komisi III Sidak Lagi di Perumahan Griya Wisata, Ingin Cepat Selesaikan Persoalan Legalitas

BONTANG - Komisi III DPRD Bontang kembali meninjau langsung Perumahan Griya Wisata, Bontang Kuala, Selasa (14/11/2023). Dalam kunjungan tersebut, komisi III ingin menyelesaikan persoalan legalitas tanah yang berkaitan dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Agus Suhadi menyatakan, untuk pemenuhan fasum dan fasos sudah menjadi keluhan warga sejak lama. Maka dari itu, dari permasalahan ini ingin cepat terselesaikan agar warga tidak semakin banyak yang mengeluhkan.

"Warga ini keluhannya apa, kan sudah disampaikan kemarin. Untuk listrik dan air tolong dituntaskan," ucapnya.

Padahal usulan perbaikan fasum dan fasos sudah masuk di Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, hingga DPRD. Adapun juga masalah terkait status legalitas musala yang masih menggantung, pembangunan jalan umum, serta drainase.

"Saya ingin ada solusi dari permasalahan itu semua. Kita ingin persoalan ini dikerahkan oleh pemerintah, agar apa yang dikeluhkan masyarakat selama ini bisa terwujud," paparnya.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Andi Ilham mengatakan, belum adanya pembangunan, sehingga pihaknya belum bisa memberikan bantuan lantaran terbentur dengan aturan.

"Jika perda sudah disahkan, semua perbaikan bisa berjalan. Kalaupun tahun ini sudah ada pengerjaan berupa perbaikan jalan," bebarnya.

Sementara itu Yudha, perwakilan dari developer menyatakan pihaknya mengalami kendala, dimana provinsi melakukan pengaturan tata ruang yang sudah ditandatangani.

"Tata ruang tersebut kami tidak dapat memecah surat, sebab kawasan tersebut menjadi jalur hijau," ungkap Yudha.

Yudha juga menambahkan, dengan surat izin yang telah dipegang, dan dengan berjalannya waktu, pihaknya pun mengajukan permohonan agar pemecahan dapat dilakukan.

"Kami sudah melakukan penyerahan dokumen kepada DPKPP, jadi kami akan mengikuti mekanisme yang ada," tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Alat CT Scan 128 Slices yang dimiliki RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

RSUD Bontang Punya CT Scan 128 Slices, Terima Pasien dari Luar

BONTANG – Saat ini RSUD Bontang telah memiliki CT Scan 128 Slices. Dimana alat ini dapat lebih unggul dibanding dengan CT Scan lainnya. Hal itu diungkapkan Kepala Instalasi Radiologi RSUD Taman Husada Bontang, dr Agustiana, Sp. Rad, M.Kes.

"CT Scan ini digunakan untuk melihat organ dalam seperti organ otak sampai ke organ jantung, yang paling unggul kami digunakan," kata dr Agustiana, Sp. Rad, M.Kes.

CT Scan sendiri memiliki banyak macam seperti CT Scan 2 Slices, 64 Slices dan 128 Slices.

"Instalasi radiologi mendapat kiriman dari dokter-dokter klinis, untuk dilakukan pemeriksaan radiologi sebagai penunjang pemeriksaan diagnosa," imbuhnya.

Ia mengatakan, instalasi radiologi memiliki berbagai macam alat-alat radiologi baik yang konvensional maupun alat-alat yang lebih canggih.

"Alat-alat canggih seperti alat USG, CT Scan. Radiologi juga memeriksakan dengan menggunakan media kontras hingga pemeriksaan HSG," katanya.

Untuk pasien-pasien yang datang ke radiologi sebelumnya, telah dilakukan rujukan ke instalasi radiologi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

"Kami terima rujukan dari dokter-dokter poli klinik. Kalau dari luar RSUD Bontang kami terima pengantar dari dokter pengirim karena kita mau tahu diagnosanya," jelasnya. (adv/yah)



Incenerator yang dimiliki RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

Musnahkan Limbah Medis Gunakan Incenerator

BONTANG – RSUD Taman Husada Kota Bontang menangani limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau limbah medis dengan cara dibakar menggunakan alat incenerator.

Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan (Kesling) RSUD Taman Husada Bontang, Sri Erna Nilawati menjelaskan, sampah-sampah medis atau limbah medis yang telah digunakan atau sisa penggunaan akan dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan incenerator dengan suhu 800 derajat celsius hingga 1.200 derajat celsius untuk pembakaran asap sisa pembakaran limbah medis.

Ia mengatakan, saat ini RSUD Bontang masih menggunakan incenerator dengan

kapasitas 80 kilogram setiap pemusnahan limbah medis.

“Setiap dari klinik atau ruangan sudah dipisahkan antara sampah medis dan sampah non medis. Limbah medis akan dimusnahkan atau dibakar di incenerator milik RSUD Bontang,” kata Sri Erna Nilawati, Senin (13/11/2023).

Incenerator RSUD Bontang telah ada sejak RSUD Bontang berdiri dan telah direnovasi hingga tiga kali.

“Kalau limbah medis alternatifnya ya di insinerasi atau dilakukan pembakaran. Kalau hasil pembakaran (abu) sisanya kita kirim ke PT PPLI setahun sekali sebagai yang mengelola jasa pembuangan limbah,” katanya. (adv/yah)

Ironi Desa Wisata Maju, Nasib Pendidikan Mundur



Oleh:

Emirza Erbyanthi, M.Pd

Pemerhati Masalah Sosial

Malahing, perkampungan di atas laut di pesisir Bontang berhasil Juara 3 ADWI 2023 Kategori Kampung Wisata Maju. Sebagai objek wisata andalan di Kota Bontang dengan kultur dan keanekaragaman hayatinya.

Namun begitu, dibalik kesuksesan tersebut terdapat realitas yang cukup miris.

Ada sekitar 10 orang pelajar di Malahing bersekolah di darat. Mereka sehari-hari harus bolak-balik, pagi berangkat menjelang sore kembali lagi ke Melahing. Biaya yang dikeluarkan para orangtua pelajar itu berkisar Rp 300 ribu per bulan, hanya untuk membayar sewa ojek kapal. Maka perlu dibantu meringankan biaya transportasi untuk mengakses pendidikan di darat. (kaltim.tribunnews.com, 25/10/2023)

Akar Masalah

Kampung Malahing kondisinya terbatas karena berada di tengah-tengah Teluk Bontang, seluas 5 hektar dengan jumlah penduduk 226 orang. Di sana sudah ada SD, tetapi baru bisa menampung sampai kelas V. Jadi untuk melanjutkan sekolah ke kelas VI dan jenjang berikutnya anak-anak Malahing harus pergi pulang ke Bontang.

Malahing desa yang memanjakan wisatawan namun sayang pendidikan tak diperhatikan. Dari sini dapat dikritisi ada paradigma keliru dari pemerintah memandang prioritas yang lebih mementingkan wisata dari pada pendidikan. Padahal dengan pendidikan anak-anak lebih terdidik dari pada wisata yang justru mempengaruhi budaya masyarakat untuk bergaya hidup liberal.

Akar masalah pendidikan ini terletak pada tata kelola wilayah yang salah. Apa saja?

Pertama, kesalahan prioritas pembangunan. Malahing memang membutuhkan pembangunan, tetapi yang dibangun saat ini lebih difokuskan pada pembangunan untuk kepentingan pariwisata. Yang dibutuhkan masyarakat Malahing adalah infrastruktur yang dapat memudahkan mereka mendapat akses layanan publik, seperti layanan pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Tingginya angka anak putus sekolah di Malahing adalah fakta yang tidak terbantahkan betapa akses dan layanan pendidikan di wilayah tersebut masih minim. Di samping itu, wilayah Malahing yang berada di tengah-tengah teluk Bontang, akses untuk sekolah tingkat V SD melalui perahu, hal ini adalah bukti bahwa sistem pendidikan di Malahing masih sangat terbatas.

Kedua, kesalahan mengelola wilayah. Malahing terkenal sebagai desa pariwisata modern. Malahing juga dikaruniai kekayaan laut yang luar biasa. Dengan potensi ini, rakyat Malahing bisa hidup sejahtera. Namun, kapitalisasi di Malahing sebagai desa pariwisata. Masyarakatnya hidup miskin dan akses pendidikan yang tidak mendukung, desanya dijadikan pariwisata oleh para kapitalis dengan dukungan regulasi penguasa tetapi pendidikannya mundur.

Alhasil, desa Malahing terkenal pariwisatanya, tetapi pendidikannya mundur. Inilah salah satu alasan kenapa sulit mewujudkan kesejahteraan di Malahing. Satu contoh nyata liberalisasi dan kapitalisasi di Malahing adalah menggenjot sisi pariwisatanya saja tetapi akses pendidikan untuk mencerdaskan

masyarakatnya minim.

Ketiga, kesalahan prioritas program. Malahing memang tidak terlalu luas, masih asri dan dikelilingi lautan. Potensi ini sangat vital bagi sistem perikanan. Sayangnya, telah mengabaikannya hingga sistem perikanan di Malahing masih ala kadarnya dan seadanya. Seharusnya diperhatikan dengan memberikan alat tangkap ikan yang modern misalnya, bukan hanya dimajukan pariwisatanya.

Lalu sarana transportasi yang memadai ataupun dengan membuka lahan-lahan baru untuk perikanan agar terwujud swasembada pangan yang berefek pada majunya perekonomian masyarakat Malahing. Sehingga masyarakatnya semakin sejahtera, pendidikan anak-anaknya juga maju.

Tak kalah penting, pemerintah pun juga memperhatikan pendidikan di Malahing dengan memfasilitasi sekolah di Malahing layak dan sampai di jenjang kelas VI. Sehingga pemerintah tidak hanya sibuk membangun untuk pariwisata, tetapi memperhatikan juga pendidikannya.

Solusi dalam Islam

Negara tidak sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengurus urusan rakyat. Islam mengharuskan negara berperan penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Apa saja yang harus negara lakukan dalam aspek jangka panjangnya?

Pertama, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan memudahkan rakyat mengakses dan mendapat pelayanan secara optimal.

Kedua, mengelola SDA secara penuh. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan SDA yang menjadi harta milik umum kepada individu, swasta, ataupun asing. Negara mengelola kekayaan alam, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan lainnya agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat secara luas. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat jika negara benar-benar mandiri mengelola SDA.

Ketiga, negara wajib memberikan pe-

Lanjutan Catatan

layanan langsung berupa jasa, yakni pelayanan pendidikan dan lainnya. Jaminan atas pelayanan ini harus diberikan secara gratis. Karena ketiganya termasuk dalam kebutuhan dasar rakyat.

Negara juga wajib menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan jasa tersebut, seperti pengadaan sarana sekolah dan segala infrastrukturnya, klinik dan semua perlengkapannya, serta sarana perlindungan keamanan berikut perangkat hukumnya.

Keempat, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyerbarluasan dan teknologi budi daya terbaru di kalangan para nelayan; membantu pengadaan mesin-mesin penangkapan ikan, serta sarana produksi perikanan lainnya.

Pengembangan Iptek perikanan ini penting agar pemerintah secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri terutama di wilayah yang banyak memiliki lautan. Negara tidak hanya mengunggulkan sisi pariwisatanya saja. Tetapi sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik, seperti pendidikannya.

Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar bin al-Khattab dengan memberikan harta dari Baitulmal (kas negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka.

Adapun dalam aspek jangka pendek, negara harus menetapkan kebijakan cepat tanggap darurat, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, mendata seluruh masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan cepat. Negara harus memastikan akses pendidikan berjalan secara adil dan merata.

Kedua, memperbaiki fasilitas pendidikan agar masyarakat Malahing memiliki ketahanan atau sistem pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Dengan tercukupinya pendidikan di Malahing, akan terjadi perbaikan sistem pendidikan masyarakat Malahing.

Ketiga, fokuskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Malahing. Bukan malah meningkatkan bidang pariwisata tapi pendidikan jadi mundur.

Keempat, lakukanlah pelayanan kepada rakyat secara optimal. Sebab, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Islam, beratnya tanggung jawab pemimpin tergambar jelas dalam sabda Nabi berikut.

Diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Wail Syaqq Bin Salamah bahwasanya ketika Umar ra menugaskan Busyur ibnu Asim ra untuk mengurus sedekah suku Hawazin, tetapi Busyur tidak mau menerimanya. Ketika ditanya, "Mengapa kamu tidak mau menerimanya?" Busyur menjawab, "Seharusnya aku menaati perintahmu, tetapi aku pernah mendengar Nabi bersabda, 'Barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum muslim, maka pada hari kiamat kelak ia akan dibedirikan di tepi jembatan Neraka Jahanam. Jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia akan selamat. Namun, jika ia tidak melaksanakannya dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan Jahanam itu dan akan terpelanting ke dalamnya selama 70 tahun.'"

Umar pun keluar dengan wajah susah. Ketika Abu Zar bertanya kepadanya, "Mengapa Anda terlihat amat susah?" Umar pun menceritakan bahwa kesusahannya karena ia telah mendengar sabda Rasulullah saw. tersebut di atas yang disampaikan oleh Busyur Asim. Lalu Abu Zar pun membenarkan bahwa ia juga pernah mendengar hadis serupa.

Wallahualam



AD



**HARAP APBD BERAU 2024
DAPAT SELESAIKAN MASALAH
DUNIA PENDIDIKAN**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

NILAI KUALITAS SDM PENGARUHI ANGKA KEMISKINAN

TANJUNG REDEB - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah dapat menjadi solusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Ia menuturkan, peningkatan SDM merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. "Jika SDM di suatu daerah baik, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan ikut baik," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, kemiskinan akan berdampak negatif ke beberapa hal, seperti kekurangan pangan dan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya kriminalitas serta kerusakan lingkungan.

"SDM kita harus meningkatkan daya saing, agar tidak kalah dengan daerah lain. Pemerintah harus ikut andil mengembangkan peng-

etahuan, keterampilan dan kemampuan SDM sebagai kunci menghapus kemiskinan dan ketimpangan," ujarnya.

Dirinya juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Baik itu melalui membuka lapangan kerja dan sebagainya.

"Apalagi dengan adanya IKN ini juga menjadi tantangan bagi kita. Saya harap SDM kita bisa berkualitas," tuturnya.

Kendati demikian, Syarifatul menganggap perlu keterlibatan semua pihak, termasuk perusahaan yang ada di Bumi Batiwakkal, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.

"Perusahaan yang ada juga harus konsisten memberi bantuan atau hak serupa terhadap masyarakat sekitarnya," pungkasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

IMBAU ORANGTUA BERIKAN VAKSIN HPV KE ANAK PEREMPUANNYA

TANJUNG REDEB - Pemberian vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak perempuan berusia 9 hingga 14 tahun sangat penting untuk mencegah serangan kanker serviks.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang mengungkapkan, orangtua harus memperhatikan kesehatan sang anak. Sehingga, vaksin harus diberikan sebelum terpapar virus HPV.

"HPV ini merupakan penyakit yang dapat menular. Jadi, saya imbau para orang tua untuk memberi vaksin terhadap anak perempuannya," ungkapnya.

Ia menilai, sosialisasi mengenai pentingnya vaksin HPV tidak hanya menjadi tugas tenaga kesehatan (Nakes), tetapi juga pihak sekolah dan lembaga lainnya.

"Tetapi saya kira, lebih bagus jika semua masyarakat ikut menyampaikan informa-

si ke masyarakat. Khususnya yang masih ada salah pemikiran soal vaksin," ujarnya.

Salah satu lembaga pendidikan yang bisa dimanfaatkan adalah Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Menurut Ratna, UKS bisa menjadi medium untuk meluruskan informasi terkait vaksin HPV ke para siswa perempuan dan orangtua mereka.

Namun, Politikus Golkar ini berharap agar sosialisasi bisa dijalankan untuk semua pihak. Sebab dinilainya, masih sedikit yang mengetahui pentingnya vaksin HPV.

"Vaksin HPV ini sangat bermanfaat untuk mencegah kanker serviks yang merupakan penyebab kematian tertinggi kedua bagi perempuan di Indonesia. Saya harap orangtua bisa sadar demi kesehatan anak-anak mereka," pungkasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

INGATKAN BAHAYA TBC

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyakit Tuberkulosis (TBC).

Dia mengungkapkan, TBC merupakan penyakit menular yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Rudi mendorong pemerintah melakukan pencegahan dan pengobatan.

"Penyakit TBC ini bisa menimpa masyarakat dari berbagai kalangan. Jika salah satu anggota keluarga terkena TBC, secara perlahan-lahan ekonomi keluarga akan

hancur, karena tidak bisa bekerja," katanya.

Menurut Politikus PDI-P ini, edukasi dari pemerintah sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini.

Ditambahkannya, pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan di tingkat bawah, seperti puskesmas, untuk membantu masyarakat yang terinfeksi penyakit TBC.

"Peran Puskesmas sangat penting. Obat TBC itu akan diberikan selama enam bulan, kemudian pemerintah akan mengontrol dampak positifnya," tandasnya. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

HARAP APBD BERAU 2024 DAPAT SELESAIKAN MASALAH DUNIA PENDIDIKAN

TANJUNG REDEB - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2024 mendatang menyentuh Rp 4 triliun. Maka dari itu, sektor pendidikan harus lebih diperhatikan.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, cukup besarnya APBD 2024 nanti harus mampu menuntaskan permasalahan dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal.

"Pendidikan adalah sektor yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tetapi saya prihatin dengan kondisi pendidikan di beberapa kampung," ungkapnya.

Dia membeberkan, sektor pendidikan yang ada di wilayah pedalaman atau perkampungan Berau, memiliki

sejumlah kekurangan. Seperti jumlah guru dan fasilitas yang kurang memadai.

"Saya harap Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten dapat memperhatikan persoalan ini. Jangan sampai dunia pendidikan kita buruk," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini berharap, APBD Berau tahun 2024 mendatang membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

"APBD tersebut harus digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

DORONG PEMERINTAH CARI SOLUSI TERHADAP DAMPAK EL NINO KE SEKTOR PERTANIAN

TANJUNG REDEB - Fenomena El Nino mengancam sektor pertanian di Kabupaten Berau. Dampaknya, belakangan ini produksi petani dikabarkan menurun.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah mengungkapkan, untuk mengatasi penurunan produksi petani akibat El Nino, pemerintah harus segera menyiapkan program alternatif.

"Program yang disiapkan harus dapat mengatasi masalah para petani yang dapat berimplikasi pada sektor pertanian," tuturnya.

Dia mengatakan, untuk mengantisipasi dampak El Nino yang dapat mengganggu ketahanan, dibutuhkan koordinasi dan sinergi semua pihak.

"Meski sudah ada program yang dibuat Kementan, tetapi program itu saya rasa belum cukup untuk mengatasi masalah petani. Buktiannya, belakangan ini produksi

petani kita menurun," bebernya.

Menurutnya, agar penurunan produksi padi teratasi, pemerintah harus menyediakan sarana prasarana yang dapat memastikan ketersediaan air.

"Misalnya mengadakan perangkat seperti pipa atau selang yang dapat menyalurkan air dari sumber-sumbernya. Hal itu sudah sebagai wujud pemerintah dalam membantu petani," jelasnya.

Kendati demikian, dirinya juga menyarankan pemerintah membuat sumur, bendungan atau mata air yang kemudian menghubungkannya dengan pipa ke sawah.

"Ini adalah solusi alternatif yang dapat membantu petani menghadapi El Nino. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik dan anggaran yang maksimal, dampak El Nino dapat diminimalisir," pungkasnya. (adv/dez)

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI RABU
15 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

PEMROV KALTIM TINJAU ULANG PENGELOLAAN TERMINAL PETI KEMAS DI KARIANGAU



**MAKAM REMAJA DI BALIKPAPAN
DIBONGKAR UNTUK OTOPSI,
KEMATIANNYA DINILAI TAK WAJAR**



prov Kaltim)

PEMROV KALTIM TINJAU ULANG PENGELOLAAN TERMINAL PETI KEMAS DI KARIANGAU

BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan ulang kerjasama pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Kariangau Balikpapan yang dikelola oleh PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

PT KTT merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat melalui PT Pelindo Terminal Peti kemas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Kerjasama perusahaan ini mulai berdiri sejak 2012 lalu.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan kontrak kerjasama pengelolaan terminal peti kemas seluas 72,5 hektar yang dilakukan antara PT Pelindo dan PT MBS sudah kadaluwarsa dan usang serta bertentangan dengan PP 54 Tahun 2017, sehingga harus segera ditinjau kembali.

"Saat ini sudah terjadi perubahan rencana induk pelabuhan dari dulunya hanya peti kemas menjadi pelabuhan multi purpose yang menyebabkan kegiatan bisnis pelabuhan non peti kemas dan non pelabuhan semakin meningkat dan belum tercakup dalam perjanjian yang sudah dibuat selama ini, sehingga PT MBS yang

mewakili pemerintah daerah kehilangan potensi keuntungan pendapatan asli daerah," kata Akmal Malik usai meninjau pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan, Senin (13/11/2023).

Pada kunjungannya Akmal Malik didampingi Direktur Operasional dan Teknik PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Sofyan didampingi Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) Aji Abidharta Hakim.

Akmal Malik menambahkan, perjanjian antara Pemprov Kaltim dengan PT Pelindo 4 (Persero) harus berpedoman pada peraturan perundangan terbaru yaitu PP No 54 tahun 2017, dimana Pemprov Kaltim telah menjadikan obyek perjanjian berupa tanah seluas 72,5 hektar dan bangunan di terminal peti kemas Kariangau sebagai penyertaan modal kepada MBS.

"Skema bagi hasil yang diterima saat ini adalah kontribusi tetap kepada MBS sebesar 3 persen dan konsesi fee sebesar 10 persen kepada Pelindo diperhitungkan dari pendapatan kotor PT KKT yang diperoleh dari seluruh hasil pengelolaan pelayanan jasa PT KKT," jelasnya.

Dengan adanya perubahan rencana induk pelabuhan Balikpapan Provinsi Kaltim yang ditetapkan 15 Mei 2023, lanjut Akmal, maka perlu disepakati kembali terkait bisnis kepelabuhanan peti kemas dan non peti kemas, bisnis pelabuhan dan non pelabuhan agar tidak menimbulkan potensi kehilangan keuntungan MBS dan PAD Kaltim. Karena realisasi pendapatan daerah dari KKT belum optimal.

"Apabila PT Pelindo tidak dapat menyepakati perjanjian ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka akan berpotensi pada terjadinya pelanggaran hukum serta mengakibatkan kurangnya potensi keuntungan dan pendapatan daerah Provinsi Kaltim," tegas Amal.

Pemerintah daerah sambung Akmal

akan segera melakukan komunikasi dengan Pelindo dan mendorong MBS dan Pelindo untuk menyepakati obyek perjanjian baru, termasuk kegiatan bisnis kepelabuhanan peti kemas dan non-kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto
Editor : Adi Lazuardi



Polisi dan keluarga bongkar makam remaja putri DA (16) untuk otopsi, Selasa (14/11) di TPU Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur.

MAKAM REMAJA DI BALIKPAPAN DIBONGKAR UNTUK OTOPSI, KEMATIANNYA DINILAI TAK WAJAR

BALIKPAPAN - Polisi melakukan pembongkaran makam remaja di Balikpapan berinisial DA (16) yang dikabarkan meninggal dengan tak wajar, pada Selasa (14/11/2023). Di mana jenazah DA dimakamkan di TPU Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur.

Dari pantauan Mediakaltim.com di lokasi, makam DA tersebut baru sekitar 3 minggu. Dan terpaksa harus dilakukan pembongkaran untuk dilakukan otopsi pihak kepolisian.

Sejak sekitar pukul 09.00 Wita, makam DA tampak dikelilingi bilik pembatas berupa terpal yang disusun dengan formasi persegi panjang. Di dalam bilik, terlihat beberapa personel kepolisian, baik dari Polsek Balikpapan Timur hingga Unit Inafis Satreskrim Polresta Balikpapan.

Di sekitar makam juga terlihat anggota keluarga DA serta beberapa warga RT 24, Manggar, Balikpapan Timur. Hingga memasuki pukul 10.00 Wita, makam DA masih dalam proses pembongkaran. Prosesnya sedikit memakan waktu, mengingat kondisi tanah lempung yang sudah terlampau kering.

Diberitakan sebelumnya, polisi sedang menyelidiki kematian remaja DA (16) yang dianggap miste-

rius di rumahnya. Keluarga melaporkan kematian setelah 8 hari, menyatakan kejanggalan dan menolak otopsi. Meskipun tidak ada tanda kekerasan pada tubuh DA, polisi mengedukasi keluarga tentang pentingnya otopsi.

Kesulitan olah TKP membuat otopsi dianggap langkah pamungkas. Polisi menunggu persetujuan keluarga sebelum membongkar makam dan melakukan otopsi di RS Bhayangkara Balikpapan untuk mengungkap penyebab kematian yang mencurigakan.

"Tadi kita lakukan pemeriksaan menyeluruh, dari pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan dalam," ujar Kasubdit Dokpol Bidokkes Polda Kaltim, AKBP dr I Gusti Gede Dharma usai pembongkaran.

Menurut Dharma, pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk mencari tanda-tanda kekerasan yang diduga menyebabkan kematian pada korban. Untuk pemeriksaan dalam, pihaknya melakukan pengambilan sampel toksikologi, seperti lambung, hati, ginjal, dan kandung kemih. Namun, pengambilan sampel darah dan urine tidak dilakukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan.

Lanjutan Makam



“Kalau lambung, seharusnya diambil organ beserta isinya. Cuma kebetulan isinya sudah kosong,” jelasnya.

Selain itu, tim forensik juga membuka rongga kepala, rongga dada, dan rongga perut korban untuk memeriksa apakah ada kekerasan. Secara umum, organ-organ ini sudah mengalami pembusukan. Hal itu, menurutnya, relatif menyulitkan proses pemeriksaan.

“Jadi belum selesai prosesnya. Kita masih menunggu pemeriksaan toksikologi, menunggu pemeriksaan patologi anatomi, untuk melihat secara mikroskopik apakah pada organ dalam, ada kelainan tidaknya,” tambah Dharma.

Sementara itu kakak almarhum, Sisca (26) mengatakan, bahwa ia hanya ingin mencari titik terang dari kejadian tersebut.

“Aku cuma ingin cari titik terang aja sih dari kejadian ini kan juga tiba-tiba bingung lah kita ini pihak keluarga,” ujarnya.

Sisca menambahkan bahwa polisi telah mengambil HP almarhum untuk diselidiki. Ia berharap ada petunjuk yang bisa

mengungkap penyebab kematian DA. Pasalnya, ia merasa bingung karena DA adalah seorang remaja yang aktif dan suka berinternetan, namun akses internet di rumahnya tiba-tiba terputus.

“Dari polisi baru aja kami kasih HP almarhum aja. Soalnya HP itu tiba-tiba terganti passwordnya, dan wifi dimatikan. Padahal dia nggak bisa hidup nggak ada internet,” jelasnya.

Menurut Sisca, selain kondisi abnormal lebam-lebam, ada kemungkinan ada orang yang masuk ke rumah saat DA sendirian. Hanya saja saat itu tidak ada tetangga yang melihat kejadian tersebut.

“Kalau dari keluarga sendiri kecurigaannya ada orang masuk di rumah karena nggak ada juga keadaan sendiri di rumah. Juga waktu itu tetangga-tetangga juga mungkin tidak ada di situ. Jadi tidak tahu kejadian itu juga,” tambahnya.

Sisca mengaku belum menduga siapa orang yang mungkin terlibat dalam kematian DA. Ia mengatakan bahwa sebelumnya DA tidak ada keluhan atau masalah dengan teman-temannya.

“Ya, itu sih belum menduga siapa orang yang masuk ke rumah. Karena kita juga belum tahu soalnya kan ini tiba-tiba juga. Sebelumnya tidak ada keluhan, nggak lagi berantem sama teman,” tutupnya.

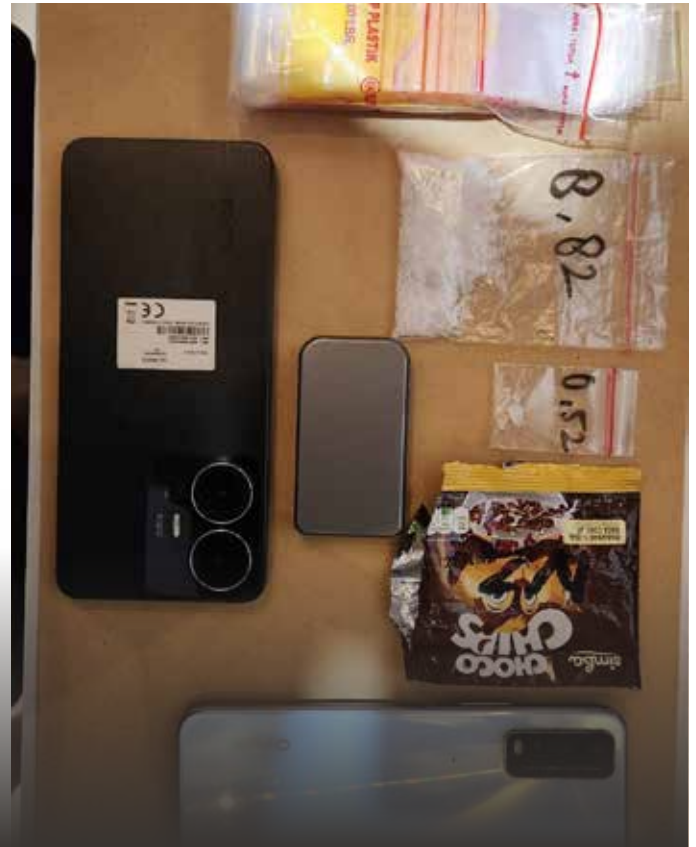
Diberitakan sebelumnya, remaja DA (16) ditemukan meninggal di Balikpapan pada 28 Oktober 2023, menimbulkan kecurigaan keluarga terkait tanda-tanda mencurigakan di tubuhnya. Meskipun keluarga membantah kemungkinan bunuh diri, hasil pemeriksaan medis menyatakan DA sehat.

Kejanggalan semakin bertambah saat jenazah dimandikan dan ditemukan lebam yang tidak sesuai dengan kondisi biasa setelah kematian. Keluarga mencoba otopsi untuk klarifikasi lebih lanjut, namun sempat kesulitan berkomunikasi dengan tim dokter yang merawat DA.

Meskipun ada indikasi kekerasan, pihak kepolisian sempat membantah adanya dugaan pembunuhan dan kematian DA tetap menjadi misteri.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



BAWA SABU 9,34 GRAM, PRIA DI SAMARINDA TERANCAM 20 TAHUN PENJARA



600 ANGGOTA PRAMUKA KALTIM BAKAL
HADIRI RAIMUNA DAERAH 2023



BAWA SABU 9,34 GRAM, PRIA DI SAMARINDA TERANCAM 20 TAHUN PENJARA

SAMARINDA - Sat Resnarkoba Polresta Samarinda kembali berhasil melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di Jalan Hasan Basri, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Kasat Resnarkoba Polresta Samarinda, Koptol Bambang Suhandoyo menjelaskan kronologis kejadian. Yakni, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 diterima informasi dari masyarakat yang dapat diper-

caya kebenarannya bahwa di Jalan Hasan Basri, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

"Setelah dilakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 01.35 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 orang laki-laki yang berada di dalam rumah yang berinisial AN (44)," terang Bambang.

Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai barang bukti berupa 2 poket/bungkus

narkotika jenis sabu seberat 9,34 gram bruto, 1 Unit timbangan digital, 1 bendel plastic klip, 1 bungkus choko chips, dan 1 unit HP merk Vivo.

Selanjutnya pelaku AN beserta barang buktinya diamankan di Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kaltim Fachruddin Djaprie (Biro Adpim Pemprov Kaltim)

600 ANGGOTA PRAMUKA KALTIM BAKAL HADIRI RAIMUNA DAERAH 2023

SAMARINDA - Sebanyak 600 anggota pramuka di wilayah Provinsi Kalimantan Timur siap menghadiri Raimuna Daerah 2023 atau pertemuan anggota Gerakan Pramuka jenjang Penegak dan Pandega dalam bentuk perkemahan besar di Bumi Perkemahan Bebaya Kwartir Cabang Kota Samarinda.

"Kegiatan ini akan berlangsung di Kecamatan, Palaran, Samarinda pada 20-25 November 2023," kata Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kaltim Fachruddin Djaprie di Samarinda, Senin (13/11/2023).

Menurut Fachrudin hampir semua Kabupaten dan Kota siap mengirimkan perwakilannya pada kegiatan itu, dan saat ini pihaknya tengah mendata peserta yang akan hadir.

" Berdasarkan data sementara estimasi peserta yang akan hadir sekitar 600 orang dari Kabupaten dan Kota se- Kaltim,terkecuali perwakilan Kutai Barat dan Mahakam Ulu," kata Fachruddin Djaprie.

Ia mengatakan berbagai kegiatan akan dilaksanakan mulai dari Bumi Perkemahan, diskusi bersama para tokoh daerah maupun kegiatan di masing-masing satuan karya pramuka.

Sementara di luar Bumi Perkemahan, peserta akan diperkenalkan dengan obyek wisata yang ada di Kota Samarinda.

"Kami mengemas kegiatan ini dengan konsep penyegaran dengan harapan pramuka Kaltim semakin solid dan tetap menjaga kekompakan," katanya.

Ditempat yang sama, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal

Malik mengatakan keberadaan Gerakan Pramuka sangat penting bagi generasi muda. Karena itu, Pemprov Kaltim menyambut baik dan sangat mendukung Raimuna Daerah 2023 ini.

Sebab, melalui Gerakan Pramuka generasi muda dibina dan diajarkan bagaimana menentukan sikap dan keputusan.

Artinya, melalui kegiatan positif ini generasi muda dituntut mampu kreatif dan inovatif serta berdaya saing. Sehingga, ketika di lingkungan masyarakat mampu membawa diri dan berkontribusi besar terhadap daerah.

"Semoga, kegiatan nanti lancar dan sukses. Prinsipnya Pemprov mendukung program ini," pesan Akmal Malik. (Ant/MK)

**Pewartu : Arumanto
Editor : Tunggul Susilo**



Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik

PJ GUBERNUR KALTIM MINTA BUMI PERKEMAHAN DI SAMBOJA BISA JADI DESTINASI WISATA

SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur mengharapkan pembangunan Bumi Perkemahan Provinsi Kaltim di Kawasan Bukit Soeharto Samboja, Kutai Kartanegara bisa disiapkan menjadi sebuah destinasi wisata baru di daerah.

Apalagi, lanjut Akmal Malik lokasi Bumi perkemahan tersebut sangat dekat dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga keberadaan Bumi Perkemahan tersebut tidak hanya untuk kegiatan Pramuka semata, namun bisa menjadi pusat kunjungan wisata bagi warga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kawasan itu berdekatan dengan IKN, kita harapkan ke depan bisa menjadi objek wisata pendukung IKN. Sehingga, ketika masyarakat di IKN ingin berlibur atau berwisata, maka pilihannya ada Bumi Perkemahan Kaltim,"

kata Penjabat Gubernur Akmal Malik ketika menerima kunjungan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kaltim Fachruddin Djaprie, di Rujab Gubernur di Samarinda, Senin (13/11/2023).

Untuk itu, Akmal Malik menyambut baik adanya rencana pembangunan Bumi Perkemahan tersebut, seperti di Cibubur menjadi bagian dari destinasi objek wisata masyarakat.

"Maka sangat penting bagi Pemprov Kaltim untuk mengintervensi atau mendukung pembangunannya," ujarnya.

Jika perlu Bumi Perkemahan Kaltim dibangun dengan desain yang representatif. Sehingga kelak mampu menjadi pusat kegiatan-kegiatan masyarakat kawasan IKN.

Karena itu, penting agar lahan kawasan dapat diketahui dengan jelas statusnya, sehingga ke depan tidak ada masalah.

Ia mengatakan, Pemprov Kaltim akan melakukan pengecekan status lahan tersebut. Sehingga, Bumi Perkemahan Kaltim akan betul-betul menjadi kawasan tujuan utama wisata.

"Harapannya, kawasan itu menjadi satu kesatuan dengan IKN. Ini juga yang menjadi fokus saya untuk mendukung pembangunan di wilayah pinggiran," harapnya.

Diketahui, Provinsi Kaltim melalui Kwartir Daerah Gerakan Pramuka telah merencanakan pembangunan Bumi Perkemahan di Km 53 Kawasan Bukit Soeharto Samboja dengan luasan kurang lebih 450 hektare.

Keberadaan Bumi Perkemahan Provinsi Kaltim, diharapkan mampu menjadi pusat kunjungan (destinasi) wisata bagi warga Ibu Kota Nusantara (IKN). (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto
Editor : Tunggul Susilo

GK Grand Kartika
HOTEL

OK!
TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~ **30% OFF**

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

- Breakfast**
2 pax 
- FREE Laundry**
Up To 2 pcs 
- FREE Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2 
- FREE Afternoon Tea** 
- FREE Mini Mantou**
5 pcs 

→ BOOK NOW

0811 581 3669
www.hotelgrandkartika.com